

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan disetiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan yaitu apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat berlangsung melalui berbagai jalur antara lain tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat bila mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun (Graine Meyha, 2018).

Selama ini pembangunan selalu diprioritaskan pada sektor ekonomi, sedang sektor lain hanya bersifat menunjang dan melengkapi sektor ekonomi. Dalam proses pembangunan daerah menuntut peran serta secara aktif masyarakat sebagai penggerak utama pembangunan. Pemerintah berperan aktif dalam mendorong dan mengambil kebijakan terhadap jalannya pembangunan yang diwujudkan melalui perumusan, peraturan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta mengerahkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif terutama yang berkaitan dengan berbagai masalah tenaga kerja dan kesempatan

kerja. Tenaga Kerja merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi (Susanti, 2000).

Pertambahan penduduk dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja dan mendukung kegiatan produksi. Jumlah penduduk yang besar tersebut juga akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti perluasan pasar, apalagi apabila kualitas penduduknya tinggi. Sumber daya manusia yang diimbangi dengan kuantitas dan kualitas dimana akan mempengaruhi peningkatan efisiensi kegiatan produksi sehingga akan meningkatkan produksi barang atau jasa yang akan menciptakan barang dengan kualitas barang yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi (Ayu Dwi, 2019).

Kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 mencapai 1.206 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi di 5 Kabupaten/Kota ini terletak di Kota Yogyakarta dengan kepadatan penduduk yaitu 13.290 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Gunungkidul 500 jiwa/km<sup>2</sup> dilihat dari BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Melalui tabel 1.1 dapat dilihat jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 hingga 2019 :

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019 (dalam jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam jiwa)
2014	3.637.116
2015	3.679.176
2016	3.720.912
2017	3.762.167
2018	3.802.872
2019	3.842.932

Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2014-2019, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 hingga 2019 menunjukkan bahwa adanya kenaikan yang signifikan dari tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk sebesar 3.637.116 jiwa pada tahun 2014 menjadi 3.824.932 jiwa pada tahun 2019. Namun bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas penduduknya agar menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara merata serta adanya penambahan jumlah lapangan pekerjaan.

Untuk mengetahui jumlah angkatan kerja di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 hingga 2019, maka akan dijelaskan pada tabel 1.2 :

Tabel 1. 2 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam jiwa)

Tahun	Bekerja	Pengangguran	Total Angkatan Kerja
2014	1.956.043	67.418	2.023.461
2015	1.891.218	80.245	1.971.463
2016	2.042.400	57.036	2.099.436
2017	2.053.168	64.019	2.117.187
2018	2.118.392	73.350	2.191.742
2019	2.134.750	69.170	2.203.920

Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2014-2019, diolah

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja, pengangguran di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 hingga 2019 menunjukkan bahwa adanya kenaikan yang signifikan dari tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tenaga kerja yang ditawarkan pada pasar tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat dan membaik. Ditunjukkan terhadap jumlah angkatan kerja yang meningkat yaitu sebesar 2.134.750 jiwa pada tahun 2019. Dengan perbandingan dari tahun 2014

yaitu sebesar 1.956.043 jiwa mengalami kenaikan yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang ada belum terserap dengan baik dalam perekonomian dikarenakan angka pengangguran masih tersedia dalam tabel diatas pada setiap tahunnya yang diiringi dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah.

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator dari pembangunan suatu perekonomian. Salah satu faktor dari peningkatan sumber daya manusia yaitu dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas dimana akan mempengaruhi peningkatan efisiensi kegiatan produksi sehingga akan meningkatkan produksi barang atau jasa. Dalam peningkatan produktivitas penyerapan tenaga kerja salah satu faktornya yaitu upah minimum kabupaten/kota. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan sebagai balas jasa yang telah dilakukan oleh tenaga kerja. Dapat dilihat tabel 1.3 rata-rata UMK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 hingga 2019 :

Tabel 1. 3 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY Tahun 2014-2019

Tahun	Rata-Rata UMK (dalam juta rupiah)
2014	1.096.660
2015	1.182.510
2016	1.318.534
2017	1.427.319
2018	1.551.660
2019	1.676.280

Sumber : Disnakertrans DIY tahun 2014-2019, diolah

Dapat dilihat dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2014 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa adanya kenaikan yang dari rata-rata jumlah UMK pada tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) pada pasar tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat dan membaik. Ditunjukkan terhadap rata-rata UMK yang meningkat yaitu sebesar 1.676.280 rupiah pada tahun 2019 data bersumber dari Disnakertrans DIY.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang berpotensi bagi suatu perekonomian di Indonesia karena memiliki sumber daya manusia dan alam yang melimpah menjadikan provinsi DIY merupakan provinsi yang dijadikan destinasi wisata oleh masyarakat. Jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 berjumlah 3.842.932 jiwa. Potensi lapangan pekerjaan yang meningkat akan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdampak baik bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menjalankan lapangan kerja bertujuan untuk mengurangi pengangguran.

Pengangguran merupakan salah satu faktor faktor penyerapan terhadap tenaga kerja. Dapat dilihat dari tabel 1.4 tingkat pengangguran di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 hingga 2019 :

Tabel 1. 4 Tingkat Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran (persen)
2014	2,65
2015	4,07
2016	2,81
2017	2,84
2018	3,06
2019	2,86

Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2014-2019, diolah

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa data jumlah tingkat pengangguran di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 hingga 2019. Data tersebut menggambarkan adanya jumlah tingkat pengangguran yang fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan keadaan yang tidak tetap. Keadaan tingkat pengangguran pada rentan waktu 2014 hingga 2019 yaitu pada tahun 2014 sebesar 2,65 persen, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,07 persen, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,81 persen, sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan dari taun sebelum yaitu sebesar 2,84 persen, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,06 persen dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2,86 persen data bersumber dari Badan Pusat Statistik provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi DIY merupakan salah satu provinsi yang berpotensi besar bagi perekonomian karena memiliki sumber daya manusia dan alam yang melimpah. Potensi lapangan pekerjaan yang meningkat akan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdampak baik bagi masyarakat DIY dengan menciptakan lapangan kerja bertujuan untuk mengurangi pengangguran.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Besar kecilnya TPT dapat menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam tingkat pengangguran pada suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), pengangguran terbuka mencakup mereka yang tidak bekerja karena tidak bisa

mendapatkan pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, dan mereka yang sudah dapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi produktivitas penyerapan tenaga kerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan tiga komponen dasar, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan pada bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama pendidikan yang mengukur tentang keberhasilan pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang mengukur tentang kehidupan layak.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan level dari pembangunan suatu daerah tersebut. IPM menjelaskan bagaimana penduduk atau masyarakat memperoleh kesehatan, pendapatan, pendidikan dan sebagainya.

Salah satu indikator dalam pembangunan yaitu dalam pengembangan kualitas maupun kuantitas dari sumber daya manusia. Tingkat penyerapan ketenagakerjaan dan produktivitas sangat berhubungan dengan indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Perkembangan IPM di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 hingga 2019 terlihat pada tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019

Tahun	IPM (dalam persen)
2014	76,81
2015	77,59
2016	78,38
2017	78,89
2018	79,53
2019	79,99

Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2014-2019, diolah

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa IPM di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan selama tahun 2014 hingga 2019. Hal ini ditunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat dan membaik. Ditunjukkan dengan peningkatan IPM dari tahun ke tahun berada pada kategori tinggi karena berada diatas 70% menandakan bahwa IPM di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat baik dan positif dilihat dari indikator kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

Selain itu faktor yang mempengaruhi dalam produktivitas penyerapan tenaga kerja adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai output penjualan akan meningkat. Melalui tabel 1.6 dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 hingga 2019 :



Tabel 1. 6 Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha tahunan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019

Tahun	PDRB (dalam juta rupiah)
2014	79.536.081
2015	83.474.451
2016	87.685.809
2017	92.300.243
2018	98.024.014
2019	109.487.543

Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2014-2019, diolah

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan selama tahun 2014 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan PDRB pada tahun 2014 sebesar Rp79.536.081 dan tahun 2019 sebesar Rp109.487.543. Namun bertambahnya PDRB dari tahun ke tahun dapat diharapkan pemerintah dapat meningkatkan produktivitas guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat disertai dengan adanya penambahan penyerapan tenaga kerja.

Dari latar belakang dan permasalahan-permasalahan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini difokuskan pada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Adapun penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja yang akan mengurangi tingginya angka pengangguran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap produktivitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap produktivitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap produktivitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap produktivitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap produktivitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019,
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap produktivitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019,

3. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap produktivitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019,
4. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap produktivitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar S-1, Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan untuk memahami serta mendalami masalah tenaga kerja yang selalu berkembang.
2. Bagi Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat menjadi bahan referensi untuk pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan tenaga kerja dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **E.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **E.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel (*pooled data*). Sampel yang digunakan meliputi data *time series* dari tahun 2014-2019 dan data *cross section* yang meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **E.3. Definisi Operasional Variabel**

#### **1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyerapan Tenaga Kerja.

- a. Undang-undang No.14 tahun 1990 tentang Ketenaga Kerjaan, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar

hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,2009). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terlihat dua unsur penting, yaitu upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima pekerja pada waktu pertama kali dia diterima bekerja, dan jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan, keperluan rumah tangga dan kebutuhan dasar lainnya (Sumarsono, 2009).
- b. Tingkat Pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (Badan Pusat Statistik tentang tenaga kerja). Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan beberapa komponen yaitu sapaian umur yang panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (Feriyanto, 2014).

- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total barang dan jasa atau nilai output yang di produksi di dalam daerah tertentu dalam satu tahun (Feriyanto, 2014)

#### E.4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data panel (*pooled data*) yang formulasi model estimatornya adalah :

$$AK_{it} = \beta_0 + \beta_1(UMK)_{it} + \beta_2(TPT)_{it} + \beta_3(IPM)_{it} + \beta_4(PDRB)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Keterangan :

AK	= Angkatan Kerja (%)
UMK	= Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah/bulan)
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (%)
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto (juta Rupiah)
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi variabel bebas
$\varepsilon$	= <i>Error term</i> (faktor kesalahan)
i	= <i>Cross Section</i> (5 kab/kota di Provinsi DIY)
t	= <i>Time Series</i> (periode 2014-2019)

(<sup>1</sup>)Modifikasi kerangka pemikiran diambil dari penelitian “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di D.I.Y*”. Jafary, Ridwan. 2018. Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penjabaran teoritik yang terdapat pada usulan penelitian serta memuat materi-materi yang disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan yang dimunculkan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai alat dan model analisis yang digunakan, data dan sumber data yang diperoleh, serta definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran-saran yang diberikan, sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**